

IMPLEMENTASI PROGRAM *CAMPUS SOCIAL RESPONSIBILITY* DINAS SOSIAL KOTA SURABAYA

(Studi Pada Kegiatan Pendampingan Mahasiswa Asuh Terhadap Anak PMKS)

LUKI PRAMADYA

S1 Ilmu Administrasi Negara , FISH, UNESA (lukipramadya@gmail.com)

Abstrak

Program *Campus Social Responsibility* merupakan program dari Dinas Sosial Kota Surabaya yang menangani anak-anak yang mengalami PMKS di kota Surabaya. Program CSR bertujuan untuk mengurangi bahkan menjadikan Kota Surabaya bebas dari anak PMKS dengan upaya memberikan kegiatan pendampingan mahasiswa asuh terhadap anak PMKS sehingga anak PMKS mendapatkan kehidupan yang normal dan layak seperti anak-anak pada umumnya. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk medeskripsikan proses pelaksanaan program CSR Dinas Sosial Kota Surabaya Studi pada kegiatan pendampingan mahasiswa asuh terhadap anak PMKS. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, adapun subyek penelitian yaitu Direktur Program CSR, Mahasiswa sebagai Kakak pendamping, anak PMKS yang menjadi adik asuh, TKSK yang merupakan perwakilan dari kecamatan. Fokus penelitian adalah variable implementasi yaitu komunikasi, struktur birokrasi, sumber daya, dan disposisi. Teknik pengumpulan data yaitu dengan dokumentasi, wawancara dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan untuk menjelaskan implementasi program CSR yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Surabaya, dari data yang diperoleh disusun secara sistematis yaitu dengan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program CSR Dinas Sosial Kota Surabaya Studi pada Kegiatan pendampingan mahasiswa asuh terhadap anak PMKS dilihat dari setiap variable model implementasi menurut George Edward III yang meliputi komunikasi, struktur birokrasi, sumber daya, dan disposisi. Pada variable komunikasi masih ditemukan kendala terkait kurangnya komunikasi yang terjalin antara kakak pendamping dengan adik asuh ataupun kakak pendamping dengan Dinas Sosial sehingga program CSR kurang berjalan dengan maksimal. Sehingga diharapkan pihak-pihak terkait program CSR dapat memperhitungkan setiap variable implementasi yaitu terkait komunikasi, struktur birokrasi, sumber daya, dan disposisi. Agar pelaksanaan Program CSR Dinas Sosial Kota Surabaya dapat berjalan lebih baik dan maksimal.

Kata kunci: Implementasi, Program *Campus Social Responsibility*

Abstract

Campus Social Responsibility Program is a program of the Social Department of Surabaya who handle children who suffered PMKS in Surabaya. CSR program aims to reduce even make throughout surabaya free of children PMKS by attempt to give mentoring activity foster students against children PMKS and the PMKS get a normal life and should be like children in general. The purpose to be achieved in this research is to described process of implementing the CSR Social Department of Surabaya study in mentoring activity foster students against children PMKS. This type of research is a descriptive study. By using qualitative research methods, as for research subjects that CSR Program Director, Students as a sister companion, PMKS child who becomes a foster sister, TKSK which is representative of the district. The focus of research is variable, namely the implementation of the communication, bureaucratic structure, resources, and disposition. Namely data collection techniques with documentation, interviews and observations. Technical analysis of the data used to explain the implementation of CSR programs implemented by the Department of Social Surabaya, from the data obtained are arranged systematically with data reduction, data presentation, drawing conclusions. The results showed that the implementation of CSR programs Social Service Surabaya (Studies in foster student mentoring activities for children PMKS) views of any variable implementation model according to George Edward III, which include communication, bureaucratic structure, resources, and disposition. In the communications variable was found to problems related to the lack of communication between sister companion to the foster brother or sister companion to the Department of Social Welfare so that less CSR program run with the maximum. So expect the relevant parties CSR programs can take into account every variable that is related to the implementation of the communication, bureaucratic structure, resources, and disposition, that implementation of CSR programs Social Department of Surabaya City can run better and a maximum.

Keywords: Implementation, Campus Social Responsibility

PENDAHULUAN

Dewasa ini permasalahan sosial yang muncul di lingkungan sekitar kita semakin kompleks terutama yang berkaitan dengan lingkungan sosial seorang anak. Beberapa contoh permasalahan sosial yang dialami oleh anak adalah tingginya tingkat putus sekolah, anak jalanan, dan tindak kekerasan pada anak. Dalam hal tingginya tingkat putus sekolah anak disebabkan diantaranya perekonomian keluarga yang kurang, kurangnya perhatian dari keluarga dan pengaruh dari lingkungan sekitar anak tersebut, padahal pendidikan sendiri untuk saat ini merupakan kebutuhan pokok bagi setiap orang.

Oleh sebab itu banyak orang berusaha untuk mendapatkan pendidikan yang baik dan layak. Akan tetapi untuk memperoleh kualitas pendidikan yang baik dan layak di Indonesia saat ini diperlukan biaya yang cukup tinggi. Oleh karena hal itu pula yang melatarbelakangi tingginya tingkat putus sekolah yang dialami oleh seorang anak.

Tingginya biaya sekolah saat ini sebenarnya sudah diantisipasi oleh pemerintah dengan beberapa cara seperti memberikan Kartu Indonesia Pintar, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan bagi warga Indonesia diwajibkan belajar 9 tahun. Namun cara-cara ini dapat dikatakan kurang berjalan maksimal karena tidak sepenuhnya tersampaikan ke warga Indonesia. Selain masalah ekonomi yang menjadi faktor anak putus sekolah adalah sistem pembelajaran yang monoton sehingga membuat anak merasa bosan untuk belajar di dalam kelas dan lebih memilih berkegiatan di luar sekolah. Sistem pembelajaran inilah yang sampai saat ini tidak memiliki perubahan yang signifikan karena sistem pembelajaran tergantung pada pihak sekolah dan tidak ada inovasi yang membuat anak merasa tidak bosan untuk belajar.

Ekonomi dan sistem pembelajaran yang menjadi masalah putusnya anak sekolah sangat terasa pada kota-kota besar salah satunya yaitu kota Surabaya. Dinas Sosial mencatat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) tepatnya pada anak putus sekolah jenjang SD-SMA pada tahun 2014 mencapai 163 anak, sedangkan untuk anak yang terancam putus sekolah jumlahnya adalah 53 anak, total untuk keseluruhan adalah 215 anak.

Kota Surabaya yang memiliki 215 anak putus sekolah, menjadikan salah satu masalah yang perlu dituntaskan oleh pemerintah kota Surabaya agar tidak ada lagi anak putus sekolah di Surabaya dan khususnya penanganan anak putus sekolah menjadi bagian dari tugas Dinas Sosial. Dengan peran serta lembaga-lembaga terkait, tentunya dapat membantu meringankan beban pemerintah guna memajukan pendidikan di tanah air. Saat ini, tidak sedikit institusi yang berperan aktif memajukan pendidikan melalui kegiatan *corporate social responsibility* (CSR). Adapun bentuk CSR yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang bersangkutan adalah pemberian beasiswa dalam bidang pendidikan

atau juga memberikan pelatihan kerja bagi masyarakat di sekitar lingkungan lembaga tersebut. Hal tersebut juga merupakan konsep pembangunan karakter masyarakat sekitar lembaga tersebut untuk lebih baik serta hal ini diharapkan bersifat *sustainable/* berkelanjutan. Konsep *corporate social responsibility* (CSR) tidak hanya dilakukan oleh lembaga-lembaga yang mengedepankan profit/untung perusahaan melainkan hal tersebut juga diadopsi oleh lembaga-lembaga nirlaba/non-profit, sebagai contohnya adalah perguruan tinggi/universitas.

Seperti yang disampaikan oleh Widyantoro dan Subhan dalam penelitian yang berjudul "*Institution Social Responsibility Sebagai Upaya Mewujudkan Sustainable Development Bagi Masyarakat Lingkar Kampus*" (2009) yang menyampaikan bahwa sejalan dengan perkembangan konsep *social responsibility*, dari *philanthropy* ke *community development* dan sekarang menjadi *sustainable development*; perguruan tinggi/universitas pun dituntut untuk memiliki kesadaran untuk menerapkan tanggung jawab sosialnya terhadap Masyarakat Lingkar Kampus, bukan sekedar pada tataran welas asih atau dermawan, namun menjangkau kepada persoalan *sustainability development* sehingga perguruan tinggi/universitas akan berperan sebagai agen pemberdayaan Masyarakat Lingkar Kampus melalui peningkatan dan pengembangan tata sosial ekonomi, kesehatan masyarakat, pendidikan, maupun kondisi lingkungan dalam rangka menopang pelestarian fungsi lingkungan. Bahkan, semestinya perguruan tinggi/universitas dapat dijadikan sebagai *pilot project* atau proyek percontohan bagi korporasi yang menerapkan CSR mengingat perguruan tinggi/universitas merupakan institusi pencetak kaum intelektual yang di dalamnya memiliki aneka sumber daya.

Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (UBHP) menegaskan: Badan hukum pendidikan menyediakan anggaran untuk membantu peserta didik Warga Negara Indonesia yang tidak mampu membiayai pendidikannya, dalam bentuk:

- a. beasiswa;
- b. bantuan biaya pendidikan;
- c. kredit mahasiswa; dan/atau
- d. pemberian pekerjaan kepada mahasiswa.

Ketentuan tersebut memberikan landasan hukum sekaligus perintah agar Badan Hukum Pendidikan (BHP) memiliki kepedulian terhadap masyarakat sehingga apabila hal itu dikaitkan dengan perguruan tinggi atau Kampus maka dapat dipahami bahwa Kampus wajib memiliki kepedulian terhadap Masyarakat Lingkar Kampus. Lebih spesifik yang dimaksud dengan Masyarakat Lingkar Kampus adalah mereka yang melakukan segala aktifitas yang bersangkutan dengan Perguruan Tinggi/Kampus tersebut, adapun warga masyarakat umum di sekitar kampus dapat juga dikatakan sebagai Masyarakat Lingkar Kampus karena segala macam bentuk kegiatan secara tanpa disadari berkaitan langsung dengan Perguruan Tinggi/Kampus tersebut.

Selanjutnya, Perguruan tinggi merupakan jenjang paling tinggi dalam pendidikan sehingga peran perguruan tinggi tidak bisa dipisahkan dari masyarakat sebagai lingkungan eksternalnya. Adanya hubungan resiprokal (timbal balik) antara perguruan tinggi dan masyarakat membuat keduanya mempunyai peran dalam keberhasilan suatu bangsa. Perguruan tinggi tidak hanya dihadapkan pada tanggung jawab di bidang pendidikan tetapi juga harus memperhatikan tanggung jawab sosial dan tanggung jawab lingkungan. Oleh karena itu juga perguruan tinggi dapat berperan nyata terhadap masyarakat dan lingkungan di sekitarnya melalui program-program peduli masyarakat dan peduli lingkungan sebagai wujud prinsip *peacefull co-existence* atau hidup berdampingan secara damai dan *symbiosis mutualism* atau hidup saling menguntungkan antara perguruan tinggi/universitas dengan masyarakat sekitarnya.

Seperti yang tertuang pada UU Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 20, ayat 2 yang menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian masyarakat. Dengan adanya konsep Tri dharma Perguruan Tinggi tersebut diharapkan adanya keterkaitan antara perguruan tinggi dengan masyarakat. Sehingga kedepannya kewajiban tri dharma di atas dapat sepenuhnya dapat dijalankan dan terdapat wujud nyata peran serta secara langsung perguruan tinggi terhadap lingkungan masyarakat sekitarnya.

Berdasarkan situasi tersebut, sejak tahun 2014, Dinas Sosial Kota Surabaya serta Perguruan Tinggi/Universitas yang berada di Surabaya bekerja sama untuk berusaha memberikan solusi permasalahan pendidikan di atas melalui program *Campus Social Responsibility*, program tersebut bertujuan untuk pengentasan masalah pendidikan yang dialami oleh anak-anak PMKS/Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial khususnya di Kota Surabaya beberapa permasalahan pendidikan yang dialami oleh anak-anak PMKS di Surabaya adalah masih adanya anak yang mengalami putus sekolah dan tidak sekolah dengan alasan yang bermacam-macam.

Program CSR Dinas Sosial Kota Surabaya sendiri hadir sebagai bentuk solusi dalam usaha pengentasan permasalahan pendidikan yang terjadi di Kota Surabaya yang merupakan kota terbesar nomor 2 di Indonesia pada tahun 2014. Tujuan program ini jelas semua pihak yang bekerja sama diharapkan dapat memberikan sumbangsih secara maksimal sehingga untuk selanjutnya di Surabaya diharapkan nantinya tidak ada lagi anak yang putus sekolah dan tidak sekolah.

Untuk Perguruan Tinggi/Universitas yang bekerja sama dengan Dinas Sosial Kota Surabaya bentuk sumbangan yang dilakukan adalah pendampingan terhadap anak-anak PMKS yang menjadi sasaran program CSR Dinas Sosial ini. Wujud pendampingan yang dilakukan adalah melalui perwakilan Universitas dalam hal ini adalah mahasiswa/mahasiswi yang bersedia untuk menjadi kakak pendamping, para

mahasiswa/mahasiswi pendamping tersebut akan dibekali dengan buku panduan ketika mereka melakukan pendampingan terhadap adik asuh mereka.

1. Kebijakan Publik

Kebijakan publik oleh Dye (Widodo, 2006:12) diartikan apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (*public policy is whatever governments choose to do or not to do*). Kebijakan publik adalah serangkaian tujuan dan sasaran dari program-program pemerintahan.

Pada dasarnya sebuah kebijakan publik terbentuk ketika dalam kehidupan masyarakat terdapat permasalahan yang kompleks sehingga menuntut adanya sebuah tindakan sebagai sesuatu yang dapat memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Udoji (Wahab, 1997:5) bahwa :

“Kebijakan publik adalah sebagai an sanctioned cours of action addressed to a particular problem or group of related problem that affect society at large (suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada suatu tujuan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi besar warga masyarakat)”.

Friedrich (Agustino, 2006:7) menyatakan bahwa “Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan atau tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintahan dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud”.

Keputusan yang dibuat oleh pemerintah sangat penting mengandung tujuan yang jelas dan konsisten dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dalam artian bahwa kegiatan sebagai bentuk kebijakan dari pejabat pemerintah harus memiliki pengaruh positif terhadap kehidupan masyarakat. Proses kebijakan publik melibatkan aktor-aktor kebijakan sebagai pihak yang mengambil keputusan. Pengertian kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud atau tujuan yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan.

Keputusan atau kebijakan dalam penelitian ini yaitu diselenggarakannya program *campus social responsibility* dengan dinas social kota Surabaya sebagai penggagas program sekaligus sebagai regulator dalam program ini, dan bekerja sama dengan universitas sebagai implementor dalam program ini. Universitas di sini adalah dalam bentuk kesukarelaan mahasiswa atau mahasiswi nya untuk menjadi kakak asuh/pendamping bagi anak-anak PMKS yang menjadi kelompok sasaran dalam program ini.

2. Implementasi Kebijakan

a. Definisi Implementasi kebijakan

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar Webster, *to implement* (mengimplementasikan) *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu (Webster dalam Wahab, 2002:64)).

Selain Webster, menurut Van Meter dan Van Horn implementasi adalah

“tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang arahkan tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan” (Van Meter dan Van Horn dalam Wahab 2002:65).

Definisi lain juga diutarakan oleh Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier yang menjelaskan makna implementasi dengan mengatakan bahwa: hakikat utama implementasi kebijakan adalah memahami apa yang seharusnya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Fokus perhatian implementasi kebijakan, yaitu kejadian-kejadian atau kegiatan yang timbul setelah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan Negara, yaitu mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian. (Mazmanian dan Sabatier dalam Wahab (2002:65)). Hal ini menjelaskan bahwa implementasi tidak bisa dilaksanakan sebelum tujuan dan sasaran dari kebijaksanaan ditetapkan dalam proses formulasi kebijakan.

Implementasi kebijakan merupakan salah satu proses mencapai tujuan dan untuk mengukur berhasil atau tidak kebijakan tersebut. Namun implementasi kebijakan belum tentu berhasil karena implementasi kebijakan menyangkut banyak faktor. Implementasi yang dimaksud implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan khususnya pelayanan kipem adalah memberikan pelayanan administrasi kependudukan atau mewajibkan membuat kipem bagi warga dari luar daerah Kota Surabaya yang tinggal di Kota Surabaya dalam jangka waktu sementara. Kartu ini memberikan kenyamanan dalam bertempat tinggal karena tidak mendapatkan sanksi dari pemerintah berupa denda administratif.

b. Unsur-Unsur Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan tahap pelaksanaan kebijakan, maka perlu mengetahui juga unsur-unsur

implementasi agar dapat mengetahui siapa dan apa yang ada pada implementasi kebijakan. Tachjan (2006:26) menjelaskan tentang unsur-unsur dari implementasi kebijakan yang mutlak harus ada yaitu:

- Unsur pelaksana
- Adanya program yang dilaksanakan serta
- Target group* atau kelompok sasaran.

Unsur pelaksana adalah implementor kebijakan yang diterangkan Dimock & Dimock dalam Tachjan (2006:28) sebagai berikut:

“Pelaksana kebijakan merupakan pihak-pihak yang menjalankan kebijakan yang terdiri dari penentuan tujuan dan sasaran organisasional, analisis serta perumusan kebijakan dan strategi organisasi, pengambilan keputusan, perencanaan, penyusunan program, pengorganisasian, penggerakkan manusia, pelaksanaan operasional, pengawasan serta penilaian”.

Pihak yang terlibat penuh dalam implementasi kebijakan publik adalah birokrasi seperti yang dijelaskan oleh Ripley dan Franklin dalam Tachjan (2006:27):

“*Bureaucracies are dominant in the implementation of programs and policies and have varying degrees of importance in other stages of the policy process. In policy and program formulation and legitimization activities, bureaucratic units play a large role, although they are not dominant.*”

Dengan begitu, unit-unit birokrasi menempati posisi dominan dalam implementasi kebijakan yang berbeda dengan tahap formulasi dan penetapan kebijakan publik dimana birokrasi mempunyai peranan besar namun tidak dominan.

Suatu kebijakan publik tidak mempunyai arti penting tanpa tindakan-tindakan riil yang dilakukan dengan program, kegiatan atau proyek. Hal ini dikemukakan oleh Grindle dalam Tachjan (2006:31) bahwa:

“*Implementation is that set of activities directed toward putting out a program into effect.*”

Menurut Terry dalam Tachjan (2006:31) program merupakan

“*A program can be defined as a comprehensive plan that includes future use of different resources in an integrated pattern and establish a sequence of required actions and time schedules for each in order to achieve stated objective. The make up of a program can include*

objectives, policies, procedures, methods, standards and budgets".

Maksudnya, program merupakan rencana yang bersifat komprehensif yang sudah menggambarkan sumber daya yang akan digunakan dan terpadu dalam satu kesatuan. Program tersebut menggambarkan sasaran, kebijakan, prosedur, metode, standar dan budget. Pikiran yang serupa dikemukakan oleh Siagian dalam Tachjan (2006:32-33) bahwa program harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Sasaran yang dikehendaki,
- b. Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu,
- c. Besarnya biaya yang diperlukan beserta sumbernya,
- d. Jenis-jenis kegiatan yang dilaksanakan dan
- e. Tenaga kerja yang dibutuhkan baik ditinjau dari segi jumlahnya maupun dilihat dari sudut kualifikasi serta keahlian dan keterampilan yang diperlukan.

Selanjutnya, Grindle dalam Tachjan (2006:35) menjelaskan bahwa isi program harus menggambarkan: "kepentingan yang dipengaruhi (*interest affected*), jenis manfaat (*type of benefit*), derajat perubahan yang diinginkan (*extent of change envisioned*), status pembuat keputusan (*site of decision making*), pelaksana program (*program implementers*) serta sumber daya yang tersedia (*resources committed*)". Program dalam konteks implementasi kebijakan publik terdiri dari beberapa tahap yaitu:

- a. Merancang bangun (*design*) program beserta perincian tugas dan perumusan tujuan yang jelas, penentuan ukuran prestasi yang jelas serta biaya dan waktu.
- b. Melaksanakan (*application*) program dengan mendayagunakan struktur-struktur dan personalia, dana serta sumber-sumber lainnya, prosedur dan metode yang tepat.
- c. Membangun sistem penjadwalan, monitoring dan sarana-sarana pengawasan yang tepat guna serta evaluasi (hasil) pelaksanaan kebijakan.

Unsur yang terakhir adalah *target group* atau kelompok sasaran, Tachjan (2006:35) mendefinisikan bahwa: "*target group* yaitu sekelompok orang atau organisasi dalam masyarakat yang akan menerima barang atau jasa yang akan dipengaruhi perilakunya oleh kebijakan". Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan kelompok sasaran dalam konteks implementasi kebijakan bahwa karakteristik yang dimiliki oleh kelompok sasaran seperti: besaran kelompok, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pengalaman, usia serta kondisi sosial ekonomi mempengaruhi terhadap efektivitas implementasi.

c. Model Implementasi Kebijakan

Model implementasi yang diungkapkan oleh para ahli mendeskripsikan implementasi kebijakan publik dengan melihat beberapa kriteria yang dianggap berpengaruh dalam suksesnya implementasi kebijakan. Kriteria tersebut mendeskripsikan suatu keadaan dari obyek yang kita teliti dengan lebih sederhana. Implementasi kebijakan dijelaskan satu persatu sesuai dengan kriteria yang dianggap berpengaruh dalam implementasi. Kriteria satu dengan kriteria yang lain dalam suatu model kebijakan publik pasti memiliki kaitan sehingga pada akhirnya dapat dideskripsikan secara komprehensif dengan mengambil kesimpulan dari penjelasan berbagai kriteria tersebut. Kriteria yang disorot dalam menjelaskan implementasi kebijakan publik berbeda-beda.

Model yang dirumuskan oleh George C. Edwards III dalam Widodo (2010:96) terdapat 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan antara lain yaitu faktor (1) komunikasi (2) sumberdaya (3) disposisi (4) struktur birokrasi

Ada empat variabel, menurut George C. Edwards III, yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik adalah :

Keberhasilan suatu pelaksanaan menurut Edward III yang dikutip Agustino dapat dipengaruhi berdasarkan faktor-faktor diatas, yaitu : *Kesatu* menurut Edward III adalah komunikasi, bahwa komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari pelaksanaan. Pelaksanaan yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan dikerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan dikerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan dan peraturan pelaksanaan harus ditransmisikan (dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat.

Menurut Edward III yang dikutip oleh Widodo, komunikasi kebijakan memiliki beberapa macam dimensi antara lain: dimensi transformasi atau penyampaian informasi, kejelasan, dan konsistensi (Edward III dalam agustino, 2006:150-151). Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka terjadinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya.

Kedua menurut Edward III bahwa sumber-sumber yang dapat menentukan keberhasilan pelaksanaan adalah salah satunya sumber daya yang tersedia, karena menurut Edward III sumber daya merupakan sumber penggerak dan pelaksana. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses pelaksanaan. Sedangkan menurut Van Meter dan Van Horn (Agustino, 2006:142), sumber daya merupakan keberhasilan proses implementasi yang

dipengaruhi dengan pemanfaatan sumber daya manusia, finansial/biaya, dan waktu. Sumber-sumber kebijakan tersebut sangat diperlukan untuk keberhasilan suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

Sumber daya merupakan keberhasilan proses merupakan hal yang mempengaruhi keberhasilan suatu pelaksanaan. Menurut Edward III sumber daya terdiri dari fasilitas, staf dan wewenang yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. (Edward III dalam agustino, 2006:151).

Ketiga menurut Edward III adalah disposisi, disposisi atau sikap para pelaksana adalah faktor penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan. Jika pelaksanaan ingin efektif, maka para pelaksana tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya.

Keberhasilan kebijakan bisa dilihat dari disposisi (karakteristik agen pelaksana). Hal ini sangat penting karena kinerja pelaksanaan kebijakan publik akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksanaannya.

Menurut Edwards III yang dikutip oleh Subarsono, karakteristik atau ciri-ciri yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis (Edwards III dalam Subarsono, 2006:91-92). Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi sangat dipengaruhi oleh sifat ataupun ciri-ciri dari pelaksana tersebut. Apabila implementor memiliki sifat atau karakteristik yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

Keempat menurut Edward III adalah struktur birokrasi, walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia atau para pelaksana mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Birokrasi sebagai pelaksana harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik. Menurut Edward III yang dikutip Agustino, struktur birokrasi terdiri dari standar operasi dan fragmentasi.

Dengan demikian, berdasarkan penjelasan tersebut bahwa suatu implementasi merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan oleh karena implementasi tersebut sudah menjadi suatu sistem yang terintegrasi dan saling berhubungan seperti didalamnya adalah komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.

Model implementasi yang cocok untuk implementasi Program *Campus Social Responsibility* Dinas Sosial Kota Surabaya adalah George C. Edward III.

3. Tinjauan umum Program *Campus Social Responsibility*

Masa kanak-kanak merupakan masa bermain, masa belajar dan masa pertumbuhan dan perkembangan, anak-anak adalah generasi penerus bangsa dan pemilik era masa depan bangsa. Secara filosofis, anak adalah anugerah dan amanah yang perlu dibina dan diarahkan untuk mempersiapkan dirinya sebagai generasi penerus bangsa. Masa anak merupakan tahapan penting dalam pembentukan dasar-dasar kepribadian di kemudian hari. Masa untuk berkeaktifitas secara konkrit, di mana anak-anak mengembangkan kemampuan menganalisa dan mengelola pola relasi sosial dalam hubungannya dengan kemampuan memecahkan berbagai jenis masalah yang dihadapi. Kemampuan tersebut akan berguna bagi hidupnya di kemudian hari. Faktanya ada dalam masa menjadi anak, mereka terlanjur berperilaku melanggar aturan atau norma yang berlaku, yang telah merugikan dirinya maupun orang lain. Jika anak dalam proses tumbuh kembangnya telah terkontaminasi perilaku yang buruk, maka kehidupan anak sebagai generasi penerus bangsa akan terancam, bahkan sampai pada kondisi zero growth.

Secara psikologis, anak termasuk kelompok yang mudah terpengaruh oleh lingkungan. Seiring dengan kondisi psikologis anak saat memasuki usia remaja, dimana anak dihadapkan dengan berbagai tugas-tugas perkembangan, yang menuntut anak untuk menyesuaikan diri. Awalnya perilaku anak masih dianggap wajar oleh orang dewasa, namun sejalan dengan tuntutan yang dihadapi anak, memunculkan perilaku yang dipandang bermasalah bagi orang lain, bahkan dinyatakan melanggar menurut peraturan perundang-undangan maupun hukum, dimana hal ini dapat membahayakan bagi anak itu sendiri. Kondisi ini tidak semata-mata muncul, melainkan melalui proses yang panjang.

Berawal dari pola asuhan yang diperoleh anak selama ini, menciptakan pola kepribadian pada anak, termasuk membentuk pola penyesuaian diri dan sosial anak. Kondisi 'stress' atau kondisi psikologis anak penuh kecemasan, dapat memicu munculnya perilaku mencari perhatian, seiring upayanya membentuk identitas diri, meski identitas yang dipilih adalah negatif (Erick Erickson, 1968). Belum lagi dengan adanya kemajuan teknologi dan globalisasi informasi yang menyebabkan terjadinya perubahan mendasar pada setiap aspek kehidupan, termasuk dalam pola hidup keluarga. Dimana keluarga tidak mampu menyesuaikan diri terhadap tuntutan perubahan menyebabkan berkurangnya fungsi keluarga terutama dalam memberikan pendidikan, bimbingan, perhatian dan kasih sayang mendukung anak berperilaku melanggar norma. Kondisi kemiskinan keluarga semakin mendorong anak-anak masuk dalam lingkaran kehidupan keras yang dapat menuntun anak pada perilaku kriminal. Kondisi tersebut cukup beralasan, mengingat terbatasnya dukungan keluarga yang telah menghilangkan sumber penopang dari kemampuan anak menghadapi masalah secara positif, akan menjadi salah satu pencetus munculnya permasalahan pada anak. Sebenarnya dalam kondisi apapun anak berhak

memperoleh pendidikan yang wajar, mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan, memperoleh pendidikan norma dan cara-cara berperilaku dalam rangka pengembangan diri anak secara optimal sesuai usianya.

Kota Surabaya adalah ibu kota Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta, dengan jumlah penduduk metropolisnya yang mencapai 3 juta jiwa, Surabaya merupakan pusat bisnis, perdagangan, industri, dan pendidikan di kawasan Indonesia timur. Diperkirakan jumlah Perguruan tinggi sebagai bagian dari institusi pendidikan pencipta akademisi, praktisi untuk meningkatkan kuliatis masyarakat, bukan sekedar penghasil tenaga kerja bagi dunia industri. Aspek penekanan perguruan tinggi menghasilkan lulusan lebih besar menghasilkan tenaga kerja untuk keperluan industri. Perguruan tinggi mulai dari universitas, institut, sekolah tinggi, akademi memiliki peran signifikan melahirkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dalam survey Human Development Indeks Indonesia masih jauh di bawah Malaysia, Thailand, Singapura yang masih berada dalam satu kawasan. Peranan peningkatan HDI oleh perguruan tinggi melalui proses pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Kontribusi perguruan tinggi bukan hanya pada aspek lulusan, pendidikan namun juga mesti memiliki kontribusi bagi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kontribusi ini berasal dari civitas akademika dengan tri dharma perguruan tinggi, yang saling melengkapi. Hal ini sering dinamakan dengan *Campus Social Responsibility*.

Mahasiswa merupakan agen intelektual yang menjadi wakil masyarakat di komunitas. Mahasiswa punya tanggung jawab moral dikarenakan kegiatan kampus secara tidak langsung sebagian dibiayai oleh negara yang notabene adalah uang rakyat. Maka salah satu kewajiban mahasiswa adalah memberikan upaya terbaik di sela-sela waktu kuliah mereka untuk mengupayakan perbaikan masyarakat di sekitarnya. Sebenarnya yang masyarakat butuhkan dari mahasiswa bukanlah bantuan materil, akan tetapi sumbangsih tenaga dan pemikiran yang bisa membantu menyelesaikan akar permasalahan atau mengurangi dampak dari permasalahan tersebut. Mahasiswa juga bisa menjembatani antara pihak-pihak yang mau mensponsori suatu program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan prinsip terbuka, jelas, dan bertanggung jawab.

Pesatnya jumlah dan sebaran permasalahan anak yang berlangsung saat ini, belum sebanding dengan daya jangkau, kapasitas dan kemampuan pelayanan social. Kewajiban pemerintah dalam memenuhi hak-hak dasar warganya yang karena sesuatu hal tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

Pelayanan kesejahteraan sosial, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam penanganan anak-anak yang bermasalah. Minimnya keterlibatan mahasiswa dalam membantu menangani anak-anak yang memerlukan pendampingan khusus perlu perhatian khusus terutama dalam keterlibatan.

METODE

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2006:3). Metode yang digunakan dalam penelitian berdasarkan tujuan penelitian ini adalah penelitian terapan. Menurut Gay dalam Sugiyono (2006:4) penelitian terapan dilakukan dengan tujuan menerapkan, menguji dan mengevaluasi kemampuan suatu teori yang diterapkan dalam memecahkan masalah-masalah praktis dalam hal ini berkaitan dengan implementasi Program *Campus Social Responsibility* Dinas Sosial Kota Surabaya.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif (*descriptive research*). Penelitian deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Dalam penelitian deskriptif cenderung tidak perlu mencari atau menerangkan saling hubungan dan menguji hipotesis (Zuriah, 2006:49). Penelitian ini digunakan jenis penelitian deskriptif karena dalam penelitian akan menjelaskan mengenai pengembangan dan memberikan gambaran pelaksanaan suatu kebijakan yaitu Program *Campus Social Responsibility* Dinas Sosial Kota Surabaya.

Dalam penelitian ini, data yang ada akan diolah dan dihasilkan yang akan menjelaskan bagaimana pelaksanaan yang sebenarnya di lapangan. Hasil yang didapat akan memberikan gambaran keadaan yang sebenarnya tentang implementasi Program *Campus Social Responsibility* Dinas Sosial Kota Surabaya (Studi Pada Kegiatan Pendampingan Mahasiswa Asuh Terhadap Anak PMKS).

Penelitian ini adalah penelitian studi kasus. Penelitian studi kasus merupakan rancangan penelitian yang mencakup pengkajian satu unit penelitian secara intensif; Misalnya satu pasien, keluarga, kelompok, komunitas atau institusi. Meskipun jumlah subyek cenderung sedikit, jumlah variabel yang diteliti sangat luas. Oleh karena itu sangat penting untuk mengetahui semua variabel yang berhubungan dengan masalah penelitian.

Penelitian ini akan mengkaji implementasi Program *Campus Social Responsibility* Dinas Sosial Kota Surabaya (Studi Pada Kegiatan Pendampingan Mahasiswa Asuh Terhadap Anak PMKS). Alasan yang mendasari studi penelitian tersebut adalah bagaimanakah pelaksanaan program yang menjadi terobosan dari dinas Sosial Kota Surabaya ini yang bekerja sama dengan Universitas di Surabaya untuk mengatasi permasalahan social dalam hal ini adalah anak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Studi yang dilakukan adalah bagaimanakah proses kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh mahasiswa/mahasiswi asuh yang secara sukarela mau turut serta dalam program *Campus Social Responsibility* Dinas Sosial Kota Surabaya.

Dalam hal ini pembahasan menyangkut implementasi kebijakan publik. Implementasi merupakan proses penentu berhasil tidaknya suatu kebijakan. Implementasi yang akan dijelaskan yaitu implementasi Program *Campus Social Responsibility* yang memiliki dasar hukum, Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Perlindungan Anak, Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan, yang dapat dilihat dari empat variabel yaitu:

1. Komunikasi

komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari pelaksanaan. Pelaksanaan yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan dikerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan dikerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan dan peraturan pelaksanaan harus ditransmisikan (dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat.

2. Sumber daya

sumber-sumber yang dapat menentukan keberhasilan pelaksanaan adalah salah satunya sumber daya yang tersedia, karena sumber daya merupakan sumber penggerak dan pelaksana. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses pelaksanaan. sumber daya terdiri dari fasilitas, staf dan wewenang yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan.

Karakteristik Agen Pelaksana

Karakteristik Agen Pelaksana, artinya sejauh mana implementasi kebijakan terlaksana secara maksimal karena dimana karakteristik kebijakan harus memiliki banyak kesamaan dengan karakteristik pihak implentornya yang saling berkaitan.

3. Disposisi

disposisi atau sikap para pelaksana adalah faktor penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan. Jika pelaksanaan ingin efektif, maka para pelaksana tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya.

4. Struktur Birokrasi

struktur birokrasi terdiri dari standar operasi dan fragmentasi. Birokrasi sebagai pelaksana harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

Fokus pada penelitian ini menuju ke implementasi Program *Campus Social Responsibility* Dinas Sosial Kota Surabaya, Bagaimanakah Penyelenggaraan atau pelaksanaan Program *Campus Social Responsibility*

dengan mendapatkan penjelasan implementasi dari pihak Petugas Dinas Sosial, Mahasiswa/Mahasiswi Asuh dalam program ini, Petugas Kecamatan yang menjadi unsur pelaksana di lapangan.

Subyek penelitian meliputi Direktur Program *Campus Social Responsibility* Dinas Sosial Kota Surabaya selaku pihak yang membidangi tentang bagaimana tata kelola pelaksanaan Program *Campus Social Responsibility* dilaksanakan, Mahasiswa/Mahasiswi Asuh yang turut serta dalam program ini, dan Petugas TKSK Kecamatan yang bertanggung jawab terhadap para mahasiswa/mahasiswi asuh di lokasi penelitian.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti secara langsung dari sumbernya (Sugiyono, 2013:62). Data primer diperoleh dari narasumber atau informan utama juga disebut sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*. Untuk mendapatkan data primer, peneliti melakukan observasi dan wawancara dengan narasumber utama.

Penentuan narasumber dalam penelitian ini menggunakan *Purposive dan snowball sampling*, yaitu memilih narasumber sampai jenuh yang dipandang sebagai pihak yang mengetahui tentang pelaksanaan Program *Campus Social Responsibility* Dinas Sosial Kota Surabaya. Dalam hal ini sampel *purposivenya* adalah Direktur Program *Campus Social Responsibility* dari dinas social kota surabaya, dan *snowball sampling* diterapkan pada mahasiswa/mahasiswi asuh yang turut serta dalam program ini, dan juga petugas TKSK di kecamatan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti secara tidak langsung (Sugiyono, 2013:62). Data sekunder berwujud data dokumentasi yang biasanya diperoleh dari studi kepustakaan yang berupa catatan, buku, dokumen yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Dalam penelitian ini data sekunder berupa data dan dokumen yang didapat dari Dinas Soisal Kota Surabaya terkait dengan Pelaksanaan Program *Campus Social Responsibility* Dinas Sosial Kota Surabaya.

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu tahap terpenting dalam penelitian. Untuk mendapatkan data yang valid dan relevan dalam penelitian, peneliti menggunakan penggalan data melalui wawancara, observasi maupun data dokumen. Keuntungan yang paling besar dari desain ini adalah pengkajian secara rinci meskipun jumlah dari responden sedikit, sehingga akan didapatkan

gambaran satu unit subyek secara jelas. Unit yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pelaksanaan Program *Campus Social Responsibility* Dinas Sosial Kota Surabaya. Teknik pengumpulan data akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik penungumpulan data dengan cara tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan subyek yang diteliti. Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2013:72), wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Di samping akan mendapatkan gambaran yang menyeluruh, juga akan mendapatkan informasi yang penting.

Dalam hal ini yang menjadi subjek wawancara adalah Pihak perwakilan dari dinas sosial kota surabaya dalam hal ini adalah Direktur Program *Campus Social Responsibility*, Mahasiswa/mahasiswi asuh yang turut serta dalam program ini, Petugas TKSK Kecamatan. dan dengan melakukan wawancara kepada semua subyek maka akan didapatkan data yang sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan.

2. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2006:240). Dalam penelitian kualitatif teknik ini merupakan pengumpul data yang utama (Zuriah, 2006:191). Analisis dokumen dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari arsip dan dokumen baik yang berada di Dinas Sosial Kota Surabaya, dan beberapa foto dari kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa/mahasiswi asuh.

3. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan (Sutrisno Hadi dalam Sugiyono, 2006:196). Observasi dilakukan dengan tak berstruktur, dalam melaksanakan observasi ini pengobservasi tidak menyediakan daftar terlebih dahulu tentang aspek-aspek yang akan diobservasi. Dalam hal ini pengobservasi mencatat semua kegiatan pelayanan kiper yang dianggap penting dalam suatu periode observasi.

Observasi dalam penelitian ini akan melihat tentang bagaimana pelaksanaan kegiatan Program *Campus Social Responsibility* yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Surabaya dan bekerja sama dengan Universitas di Surabaya.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Tylor dalam Moleong (2011:4)

penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Hal tersebut sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini. Dalam penelitian kualitatif menggunakan analisis data dari wawancara yang dilakukan di Dinas Sosial Kota Surabaya, dengan Mahasiswa/Mahasiswi asuh, Petugas TKSK kecamatan.

Analisis data dalam penelitian merupakan suatu kegiatan yang sangat penting dan memerlukan ketelitian serta kekritisan dari para peneliti. Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. (Bogdan dan Biklen, 1982 dalam Moleong (2011:248).

Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2006:246), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh.

Metode analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif yang digunakan dalam suatu penelitian untuk memperoleh gambaran secara kualitatif dan akan menghasilkan data secara deskriptif melalui uraian. Adapun tahapan analisis data kualitatif dalam penelitian ini adalah:

1. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya (Sugiyono,2006:247). Dalam penelitian akan didapatkan banyak data yang belum terpilah dengan tepat untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditanyakan sejak awal. Data yang telah didapatkan harus digolongkan, dibuang yang tidak perlu dan diorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

2. Penyajian Data

Berupa sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian ini penyajian data dilakukan dalam bentuk teks yang bersifat naratif. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3. Menarik Kesimpulan atau Verifikasi

Kesimpulan dalam penelitian ini berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang menjadi jelas dilakukan dengan cara longgar, tetap

terbuka, tetapi dirumuskan secara rinci dan mengakar dengan kokoh.

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam suatu penelitian ilmiah. Dalam penelitian Pelaksanaan Program *Campus Social Responsibility* Dinas Sosial Kota Surabaya (Studi Pada Kegiatan Pendampingan Mahasiswa Asuh Terhadap Anak PMKS) instrument penelitian yang digunakan adalah pedoman wawancara dan kamera untuk mendapatkan gambar sebagai bukti kejelasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Program *Campus Social Responsibility* adalah salah satu langkah Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Sosial Kota Surabaya untuk mengatasi permasalahan anak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Program *Campus Social Responsibility* adalah program kerjasama yang dilakukan antara Dinas Sosial Kota Surabaya dengan Universitas di Surabaya guna melakukan pendampingan terhadap anak PMKS dengan menerjunkan sukarelawan dari universitas dalam hal ini adalah para Mahasiswa/mahasiswi.

Program *Campus Social Responsibility* tidak dapat muncul secara tiba-tiba tanpa ada landasan hukum yang mendasarinya, program ini didasari oleh Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial tepatnya pada pasal 10 bagian 1 dan 2 yang menyebutkan :

Pasal 10 bagian 1 :

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ditujukan kepada PMKS baik secara perorangan, keluarga, kelompok sosial, maupun masyarakat.

Pasal 10 bagian 2 :

PMKS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah mereka yang tergolong pada salah satu atau lebih kategori permasalahan kesejahteraan sosial sebagai berikut :

- a. Kemiskinan;
 - b. Keterlantaran;
 - c. Kecacatan;
 - d. Ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
 - e. Korban bencana;
 - f. Korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi
- Pada pasal 10 bagian 2, penyelenggaraan pendidikan masuk pada bagian kemiskinan dan keterlantaran dimana peningkatan derajat dan pemberian pelayanan pendidikan.

Instruksi Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, dan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak tepatnya pada bagian kedua pasal 10 tentang pendidikan.

PEMBAHASAN

Melihat hasil penelitian yang telah di dapat, maka dapat dilakukan analisis pelaksanaan program CSR Dinas Sosial Kota Suranaya dengan menggunakan teori George Edwards III untuk mengetahui pelaksanaan program yang ada. Teori milik George Edward III ini mencakup empat (4) variabel, diantaranya komunikasi, sumberdaya, disposisi/sikap, Struktur birokrasi. Hal ini sangat sesuai untuk menganalisis data yang sudah didapat dalam penelitian ini. Sehubungan dengan hal ini, maka peneliti berusaha menganalisis berdasarkan variabel yang diungkapkan oleh George Edwards III sebagai berikut:

a. Komunikasi

Komunikasi antarorganisasi dimulai dari pihak Dinas Sosial sebagai pembuat program dengan melakukan komunikasi berupa kerjasama dengan pihak perguruan tinggi, TKSK, yaitu RT/RW hingga Pemerintah Daerah Kota Surabaya, hal ini ditujukan agar dalam perumusan awal program dapat sesuai dengan kondisi di lapangan sehingga program yang telah dibentuk dapat berjalan dan tepat sasaran.

Jika komunikasi yang dilakukan kurang oleh pihak-pihak terkait maka dimungkinkan koordinasi yang dilakukan tidak berjalan dengan baik, Karena banyak muncul miskomunikasi antar instansi pelaksana tersebut. Dalam program CSR ini pihak yang terkait pelaksanaan adalah Perguruan tinggi, TKSK yaitu perwakilan dari kecamatan, SKPD dan Dinas Sosial jika muncul permasalahan dan mencari solusinya.

Berdasarkan hasil pemaparan dari implementor melalui wawancara oleh peneliti menunjukkan komunikasi yang dilakukan oleh tiap-tiap instansi berjalan dengan baik, jadi ada komunikasi dalam bentuk laporan yang dibuat oleh kakak pendamping yang dilaporkan ke TKSK, dan TKSK akan melaporkan ke Dinas Sosial. Akan tetapi peneliti beranggapan bahwa komunikasi yang dijalin masih kurang maksimal terbukti ketika ada pendamping yang tidak melakukan pendampingan, pihak Dinas Sosial membiarkan dan tidak mencoba untuk menghubungi kakak pendampingnya tidak melakukan pendampingan tersebut.

Dalam hal ini secara keseluruhan yang diteliti adalah pelaksanaan program CSR Dinas Sosial. Sehingga banyak factor yang mempengaruhi bagaimana program ini berjalan. Program ini diterbitkan didasari atas banyaknya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ada sehingga program ini dibuat. Kebijakan-kebijakan yang mendasari adalah Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Instruksi Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan

Pendidikan, dan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Pokok pembahasan adalah pelaksanaan program CSR dimana program CSR adalah program yang diperuntukkan bagi PMKS Khususnya anak putus sekolah dan rentan putus sekolah yang tinggal di kota Surabaya. Berdasarkan hasil penelitian, program ini sudah terlaksana dengan baik, jumlah anak putus sekolah pada tahun 2014 sebelum ada program CSR mencapai 162 adik asuh dan setelah ada program CSR jumlah anak putus sekolah tinggal 72 adik asuh, dengan begitu yang sudah kembali melanjutkan sekolah sebanyak 90 adik asuh dan untuk anak rentan putus sekolah yang sebelumnya berjumlah 53 adik asuh dan setelah ada program CSR berkurang 53 adik asuh atau dapat dikatakan adik asuh rentan putus sekolah sepenuhnya sudah kembali melanjutkan sekolahnya. Namun jika dilihat dari sistem pendampingan satu adik asuh didampingi dengan satu kakak pendamping dengan begitu dapat dikatakan masih kurang maksimal karena masih ada yang belum teratasi.

Dilihat dari tujuan Program CSR ini memang pemerintah ingin memberikan yang terbaik bagi Kota Surabaya terkait penanganan PMKS, khususnya anak putus sekolah. Dengan begitu Surabaya terbebas dari anak putus sekolah. Secara keseluruhan ukuran dan tujuan program CSR Dinas Sosial sudah tercapai dan terlaksana dengan baik.

b. b. Sumberdaya

Sumberdaya yang tersedia untuk melaksanakan program *Campus Social Responsibility* antara lain adalah sumberdaya manusia, sumberdaya finansial, dan sumberdaya waktu

1. Sumberdaya Manusia

Berdasarkan sistem pelaksanaan program CSR, pelaksana dari perguruan tinggi yaitu mahasiswa yang menjadi pendamping adik asuh. Kakak pendamping melakukan pendampingan dengan 1 adik asuh, jadi 1 kakak pendamping mendampingi satu adik asuh. Selain kakak pendamping terdapat Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang merupakan perwakilan dari kecamatan yang juga mendampingi kakak pendamping dan adik asuh. Tiap-tiap kecamatan memberikan 1 perwakilan TKSK.

Sumberdaya manusia dari perguruan tinggi yaitu mahasiswa mengalami kekurangan. Kekurangan ini terlihat ketika pelaksanaan pendampingan, kakak pendamping tidak datang untuk melakukan pendampingan, sehingga terdapat adik asuh yang tidak mendapatkan pendampingan. Sedangkan dari Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) tidak mengalami kekurangan.

2. Sumberdaya Finansial

Sumberdaya finansial untuk program CSR Dinas sosial dari pemerintah Kota Surabaya tidak dianggarkan, dapat disebut juga program sukarela.

Dalam pelaksanaan program CSR terdapat bantuan-bantuan yang diberikan oleh pihak perguruan tinggi dan dari pihak personal Dinas sosial dimana bentuk bantuan tersebut berupa biaya sekolah dan peralatan sekolah yang diperuntukkan bagi adik asuh yang melanjutkan sekolah.

3. Sumberdaya Waktu

Sumberdaya waktu yaitu waktu pendampingan adik asuh secara fleksibel, maksud dari fleksibel yaitu lama durasi waktu pendampingan tidak pasti. Pendampingan dilakukan ketika adik asuh memiliki waktu luang, karena adik asuh terkadang sedang membantu orang tuanya. Namun diusahakan tiap seminggu dilakukan pendampingan sekali.

c. c. Disposisi

Agen pelaksana dari program CSR adalah Dinas sosial Kota Surabaya sebagai pembuat program, program ini juga termasuk dalam tanggung jawab Dinas Sosial Kota Surabaya. Untuk pelaksanaannya lebih banyak dilaksanakan oleh perguruan tinggi tepatnya adalah mahasiswa dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). Berdasarkan hasil penelitian, pihak dinas sosial mengajak kerjasama dengan perguruan tinggi tepatnya mahasiswa untuk menjadi pendamping adik asuh dalam pelaksanaannya dan hasilnya terdapat 19 perguruan tinggi yang mau untuk bekerja sama.

Pada pelaksanaannya kakak pendamping melakukan pendampingan dengan mandatkan rumah adik asuh dan melakukan pendampingan dirumahnya, selain melakukan pendampingan di rumahnya, pendampingan juga dapat dilakukan di rumah Ketua RT setempat atau Balai RW, Kakak pendamping juga di bantu oleh TKSK dalam hal pendampingan. Selain pendampingan kakak pendamping dan TKSK melakukan koordinasi untuk membahas bimbingan selanjutnya. Jika terjadi masalah Pihak TKSK akan mencari solusi dengan cara merundingkan masalah tersebut dengan SKPD dan Dinas Sosial.

Kakak pendamping juga membuat laporan rutin tiap 2 minggu sebagai laporan perkembangan adik asuh, dimana laporan tersebut diserahkan ke TKSK dan pihak TKSK akan memberikan laporan tersebut ke Dinas Sosial sebagai bentuk pertanggungjawaban program tersebut

SKPD terkait memberikan solusi terkait dengan permasalahan yang muncul, Kak Seto Homeschooling memberikan bimbingan teknis dasar kepada kakak pendamping sebelum melakukan pendampingan dan media massa Jawa Pos melakukan peliputan terkait program CSR.

Melihat agen pelaksana melakukan tugas sesuai dengan bagiannya, hal ini menunjukkan bahwa agen pelaksana sepenuhnya mendukung adanya program CSR karena, meskipun tidak ada

anggarannya, agen pelaksana tetap melaksanakan program tersebut dan juga melihat dari hasilnya yang sudah ada kembali ke sekolah.

Para pelaksana program CSR ini meliputi mahasiswa sebagai kakak pendamping dan TKSK sebagai perwakilan dari kecamatan. Sikap dari pelaksana maksudnya adalah bagaimana sikap seorang implementor menanggapi adanya program CSR Dinas Sosial apakah merespon dengan baik dengan cara melaksanakan perda tersebut sesuai dengan isinya ataupun sebaliknya. Berdasarkan hasil penjelasan dari pelaksanaannya, sikap yang diberikan oleh pelaksana sangat mendukung adanya program CSR ini alasannya karena untuk kebaikan kota Surabaya, selain itu juga membantu menyelesaikan masalah anak putus sekolah.

Namun dari pihak Dinas Sosial menyatakan bahwa terdapat beberapa mahasiswa yang bersedia menjadi kakak pendamping ternyata pada pelaksanaannya tidak ada, jadi dapat dikatakan ada juga yang kurang mendukung adanya program ini. Begitu juga dengan adik asuh yang tidak mau didampingi karena menganggap program ini kurang bermanfaat karena dampak yang muncul tidak langsung terasa, namun dampaknya terasa pada waktu yang akan datang.

d. Struktur Birokrasi

Birokrasi biasanya menjadi pelaksana kebijakan secara keseluruhan. Birokrasi tidak hanya berada dalam struktur pemerintah, tetapi juga dalam organisasi-organisasi swasta yang lain bahkan di institusi-institusi pendidikan dan kadangkala suatu sistem birokrasi sengaja diciptakan untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu.

Berikut adalah tugas dan fungsi dari struktur organisasi dalam program CSR Dinas Sosial

Tupoksi Direktur Program :

1. Mengkoordinir segala tugas terkait kegiatan CSR
2. Membuat perencanaan kegiatan
3. Mengkoordinasikan segala SDM yang ada dalam Kegiatan CSR
4. Memonitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
5. Melaporkan perkembangan kegiatan kepada penanggungjawab
6. Koordinasi dengan Bidang Rehabosos terkait kegiatan CSR
7. Koordinasi dengan Perguruan Tinggi terkait kegiatan CSR

Tupoksi Koordinator :

1. Memasangkan adik asuh dan kakak pendamping sesuai data dampingan
2. Melakukan update data sesuai data dampingan
3. Mengkoordinasikan segala kegiatan CSR dengan menyampaikan informasi dari atas ke bawah

4. Memfasilitasi/mengkoordinasikan kebutuhan dan temuan Satgas & kakak pendamping kepada Direktur Program
5. Merekap laporan kegiatan kakak pendamping dari Satgas
6. Melaporkan update data kepada Bidang Rehabosos dan Direktur Program
7. Memonitoring kegiatan kakak pendamping melalui Satgas dan Pokja Kampus

Tupoksi Satgas dan TKSK:

1. Fasilitator pelaksanaan program pendampingan di wilayah dampingan
2. Memonitoring kegiatan pendampingan yang dilakukan kakak pendamping setiap melakukan kunjungan
3. Membantu penyelenggaraan kegiatan pendampingan dengan memberikan penyuluhan dan bimbingan terhadap permasalahan yang ditemukan kakak pendamping
4. Melakukan koordinasi dengan PSKS lainnya terkait penyelesaian permasalahan kesejahteraan sosial (pendampingan CSR)
5. Membantu mengembangkan partisipasi sosial masyarakat dan jejaring kerja dengan pihak lain dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial (pendampingan CSR).
6. Melaporkan pelaksanaan hasil kegiatan pendampingan berupa rekap laporan dari seluruh kakak pendamping di wilayahnya setiap bulan

Tupoksi Pokja Kota :

1. Mengkoordinir seluruh mahasiswa pendamping dalam pelaksanaan kegiatan CSR
2. Membuat program kerja dalam menunjang kegiatan CSR
3. Memonitoring keaktifan pendampingan
4. Mengkoordinasikan segala informasi dari Dinas Sosial kepada seluruh mahasiswa pendamping
5. Memetakan temuan masalah dan mencari solusi dari permasalahan dengan berkoordinasi dengan Dinas Sosial

Tupoksi Pokja kampus :

1. Mengkoordinir seluruh mahasiswa pendamping dalam pelaksanaan kegiatan CSR
2. Memonitoring keaktifan pendampingan
3. Mengkoordinasikan segala informasi dari Koordinator dan Pokja Kota kepada seluruh mahasiswa pendamping se Wilayah Koordinasi
4. Memetakan temuan masalah dan mencari solusi dari permasalahan dengan berkoordinasi dengan Satgas, TKSK dan Pokja Kota

Struktur organisasi pada program CSR dapat dinilai sudah sangat baik karena tiap-tiap elemen yang terkait dalam program CSR ini memiliki fungsi dan tugas pokok masing-masing dan menurut temuan peneliti di lapangan semua elemen tersebut telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing, hanya saja

memang terdapat beberapa permasalahan yang berakibat bahwa program CSR ini tidak dapat berjalan sesuai target dan tujuannya.

PENUTUP

Simpulan

Program Campus Social Responsibility (CSR) merupakan program yang dibentuk oleh Dinas Sosial Kota Surabaya yang bekerja sama dengan Universitas/perguruan tinggi, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), SKPD terkait, Kak Seto Homeschooling, dan Jawa Pos

Ketika pelaksanaan program muncul beberapa masalah baik dari kakak pendamping maupun dari adik asuh. Masalah dari kakak pendamping yaitu ketika pelaksanaan pendampingan, kakak pendamping tidak terlihat di lokasi pendampingan sehingga adik asuh yang tidak didampingi oleh kakak pendamping akhirnya didampingi oleh kakak pendamping lain yang hadir. Selanjutnya beberapa masalah yang muncul berkenaan dengan program CSR adalah kurangnya komunikasi yang terjalin baik antara kakak pendamping dengan adik asuh atau pun kakak pendamping dengan Dinas Sosial sehingga beberapa masalah di atas itu juga yang menjadikan program ini tidak dapat berjalan secara maksimal. Sedangkan masalah yang terdapat pada adik asuh yaitu adik asuh yang tidak mau didampingi sehingga sampai saat ini masih belum dapat kembali melanjutkan sekolahnya.

Saran

Program Campus Social Responsibility (CSR) Dinas Sosial dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik. Terkait adanya kekurangan dalam pelaksanaan, maka perlu perbaikan dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan yang perlu diperbaiki sebagai berikut:

1. Dinas sosial lebih menekankan pada komunikasi dengan kakak pendamping yang tidak hadir pada pelaksanaannya.
2. Dinas Sosial, TKSK, dan SKPD terkait mencoba untuk mencari solusi agar adik asuh yang awalnya tidak mau di dampingi pada akhirnya mau di damping supaya dapat melanjutkan sekolahnya.

DAFTAR PUSTAKA

A.B. Susanto. *Corporate Social Responsibility*. Jakarta : The Jakarta Consulting Group, 2007.

Agustino, Leo.2012. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV Alvabeta.

Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*. Jakarta: Kencana

Moleong, Lexy J. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Patilima, Hammid. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta:Alfabeta.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2011. *Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak*.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. 2012. *Peraturan Daerah kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial*.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2012. *Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan*.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2009. *Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (UUBHP)*. Subarsono,AG. 2010. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Subarsono,AG. 2010. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono, 2013. *Memahami Penelitian Kulitatif*. Bandung: Alfabeta.

Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung : Penerbit AIPI Bandung – Puslit KP2W Lemlit Unpad.

Wahab, S. 2002. *Analisis Kebijaksanaan: Dari formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi aksara

Wahab, Solichin Abdul. 2005. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Bumi Aksara: Jakarta

Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Zuriah, N. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan : Teori-Aplikasi*. Jakarta: Bumi Akasara